



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I WAYAN SAPTA DHARMA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL
3. NHK : 122385

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 6.366.957.000**

1. Tanah Seluas 560 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 343.840.000
2. Tanah Seluas 430 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 264.020.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA  
BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 196.328.000
4. Tanah Seluas 430 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 264.020.000
5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 245.600.000
6. Tanah Seluas 216 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL  
SENDIRI Rp. 2.083.320.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 231 m2/134 m2 di KAB / KOTA KOTA  
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.338.277.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 219 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA  
DEPOK , HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 631.552.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 297.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI JEEP/ OUTLANDER Tahun 2015, HASIL  
SENDIRI , LAINNYA , Rp. 215.000.000



2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2008, HASIL SENDIRI  
Rp. 82.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	168.250.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	937.390.177
F. HARTA LAINNYA	Rp.	517.000.000
Sub Total	Rp.	8.286.597.177

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.286.597.177

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.